

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Polri terdiri dari 31 Polda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat Polda DIY merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda. Polda DIY dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur Negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum di DIY.

1. Sejarah Polda DIY

Mengingat semakin kompleksnya berbagai kasus yang terjadi di Yogyakarta akhirnya dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/08/IX/1996 tanggal 16 September 1996 POLWIL Yogyakarta lepas dari Polda Jateng menjadi Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta tipe C, menyusul 3 tahun kemudian berdasarkan Keputusan Menhankam / Panglima TNI No. Pol: Kep/14/M/1999 tanggal 30 Agustus 1999 Kepolisian Daerah mengalami validasi dari Polda tipe C menjadi tipe B, dan disusul 2 Skep Kapolri yaitu :

1. Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang perubahan struktur Polda pola umum Polda DIY
2. Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/58/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang penetapan Dik Pam Pariwisata di Polda DIY dan Polda Bali.

Sampai dengan saat ini Polda DIY memiliki 1 Poltabes, 4 Polres, dan 80 Polsek yang tersebar di seluruh wilayah dengan perincian sebagai berikut:

- a. Poltabes Yogyakarta membawahi 14 Polsek
- b. Polres Sleman membawahi 19 Polsek
- c. Polres Bantul membawahi 17 Polsek
- d. Polres Kulonprogo membawahi 18 Polsek
- e. Polres Gunungkidul membawahi 12 Polsek.

Berdasarkan riwayat perkembangan Polda DIY ini tentunya membawa dampak atau konsekuensi baik dari segi organisasi dan sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan dalam melayani, mengayomi dan melindungi kepada masyarakat di wilayah hukum Polda DIY.

Adapun situasi Wilayah hukum Polda DIY dengan luas Wilayah kurang lebih 3.133,15 km² dan Jumlah Kabupaten sebanyak 4 Kabupaten, 1 Kota Madya, 78 Kecamatan, 438 Kelurahan. Batas Wilayah Yogyakarta membentang dari :

- a. Utara : Perbatasan dengan Kabupaten Magelang
- b. Selatan : Perbatasan dengan Samudera Indonesia
- c. Timur : Perbatasan dengan Kabupaten Klaten
- d. Barat : Perbatasan dengan Kabupaten Purworejo

2. Visi dan Misi Polda DIY

a. Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalannya kemitraan dengan masyarakat, penegak hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan di Wilayah D.I. Yogyakarta yang kondusif dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan preventif dan represif (penegak hukum) dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan yang kondusif;
- 2) Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 3) Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
- 4) Memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan;
- 5) Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi/lembaga terkait;
- 6) Menjaga kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 7) Menjaga keamanan kegiatan masyarakat, obyek vital nasional dan objek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian;
- 8) Menjaga keamanan wilayah D.I. Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota wisata dan kota perjuangan serta mendorong terwujudnya Yogyakarta sebagai kota pusaka (*heritage city*).

3. Arti Lambang Polda DIY



Gambar 2.1. Lambang Polda DIY

(Sumber : Website <http://jogja.polri.go.id/>, Diakses 28 Maret 2017)

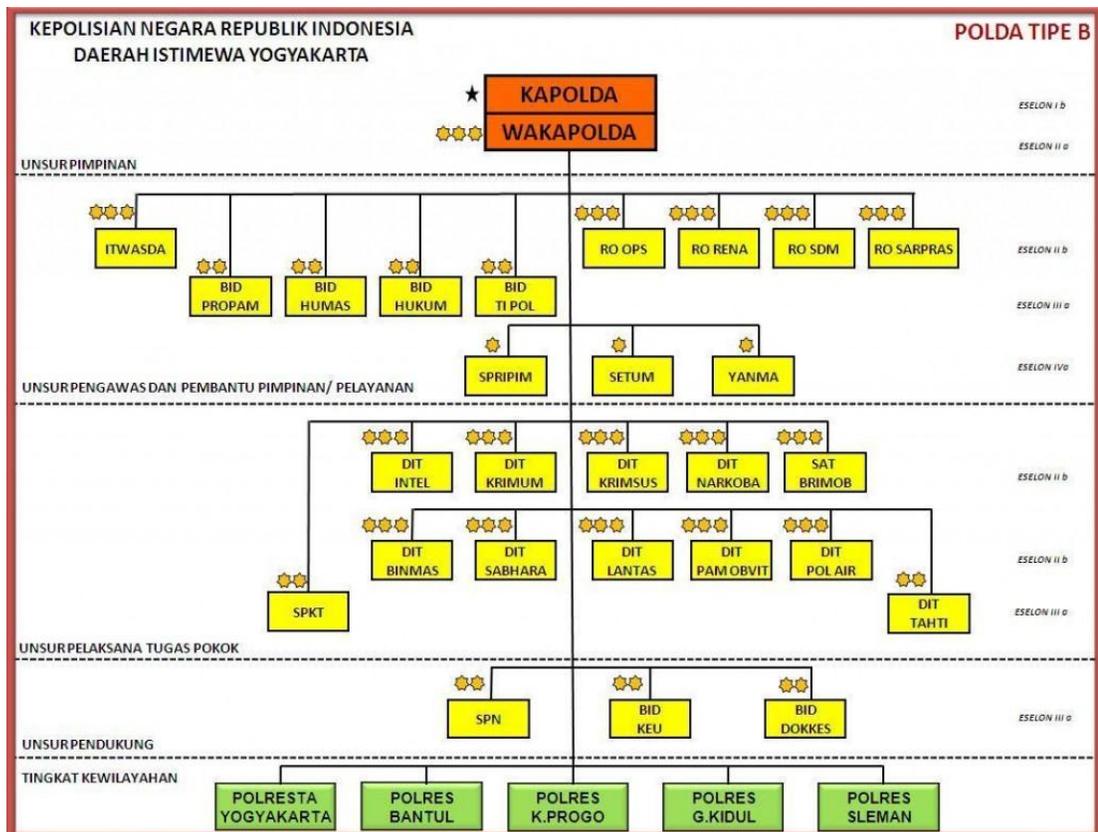
a. Gapura dan 9 Anak Tangga

1. Polda Yogyakarta berada dalam wilayah kerajaan Mataram yang merupakan pusat seni yang adiluhung dari masa ke masa
2. Jumlah 9 = tangga untuk mencapai hasil tugas sebagai prajurit Bhayangkara harus lewat ujian-ujian (hindari nafsu angkara murka yang ada pada manusia, bersih tidak tercela)
3. Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa mempunyai latar belakang perjuangan sejarah kemerdekaan RI dimasa revolusi dengan pantang menyerah. Ini merupakan cerminan dari perjuangan raja-raja Mataram tempo dulu saat melawan penjajahan Belanda.

b. Kelopak Bunga ‘5’ Buah Warna Putih

1. Sabda Pandito Ratu = apa yang dipikirkan secara sempurna dan tidak akan berubah.
2. Berbudi Bawa Leksana = tidak segan-segan memuji dan memberi penghargaan kepada yang berjasa, serta menghukum kepada yang bermasalah demi tegaknya kewibawaan.

4. Struktur Organisasi Polda DIY



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Polda DIY
 (Sumber : Website <http://jogja.polri.go.id/>, Diakses 28 Maret 2017)

Keterangan bagan struktur organisasi kepolisian Polda DIY diatas adalah:

a. Unsur pimpinan di Polda DIY terdiri dari:

1) Kapolda (Kepala Polisi Daerah)

Merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

2) Wakapolda

Merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda; dan memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan di Polda DIY terdiri dari:

1) Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah) Itwasda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada di bawah Kapolda. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda. Itwasda dipimpin oleh 80 Inspektur

Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

2) Roops (Biro Operasi)

Roops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian. Roops dipimpin oleh Karoops, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

3) Rorena (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran)

Rorena merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang berada di bawah Kapolda. Rorena bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda, memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi, membina penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda, dan menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda. Rorena dipimpin oleh Karorena yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

4) Ro SDM (Sumber Daya Manusia)

Ro SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda. Ro SDM dipimpin oleh Karo SDM yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

5) Rosarpras (Biro Sarana Prasarana)

Rosarpras merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Rosarpras bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan. Rosarpras dipimpin oleh Karosarpras, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

6) Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan)

Bidpropam merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan

tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidpropam dipimpin oleh Kabidpropam, yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

7) Bidhumas (Bidang Hubungan Masyarakat)

Bidhumas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidhumas bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan aneka kegiatan tugas Bidhumas. Bidhumas dipimpin oleh Kabidhumas yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

8) Bidkum (Bidang Hukum)

Bidkum merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah. Bidkum dipimpin oleh Kabidkum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

9). Bid TI Polri (Bidang Teknologi Informasi Polri)

Bid TI Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bid TI Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Bid TI Polri dipimpin oleh Kabid TI Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolda.

10) Spripim (Staf Pribadi Pimpinan)

Spripim merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Spripim dipimpin oleh Koorspripim yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

11) Setum (Sekertariat Umum)

Setum merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Setum bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda. Setum dipimpin oleh Kasetum yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda

12) Yanma (Pelayanan Markas)

Yanma merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda. Yanma dipimpin oleh Kayanma yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

B. Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas Polda DIY)



Gambar 2.3. Lambang Humas Polri

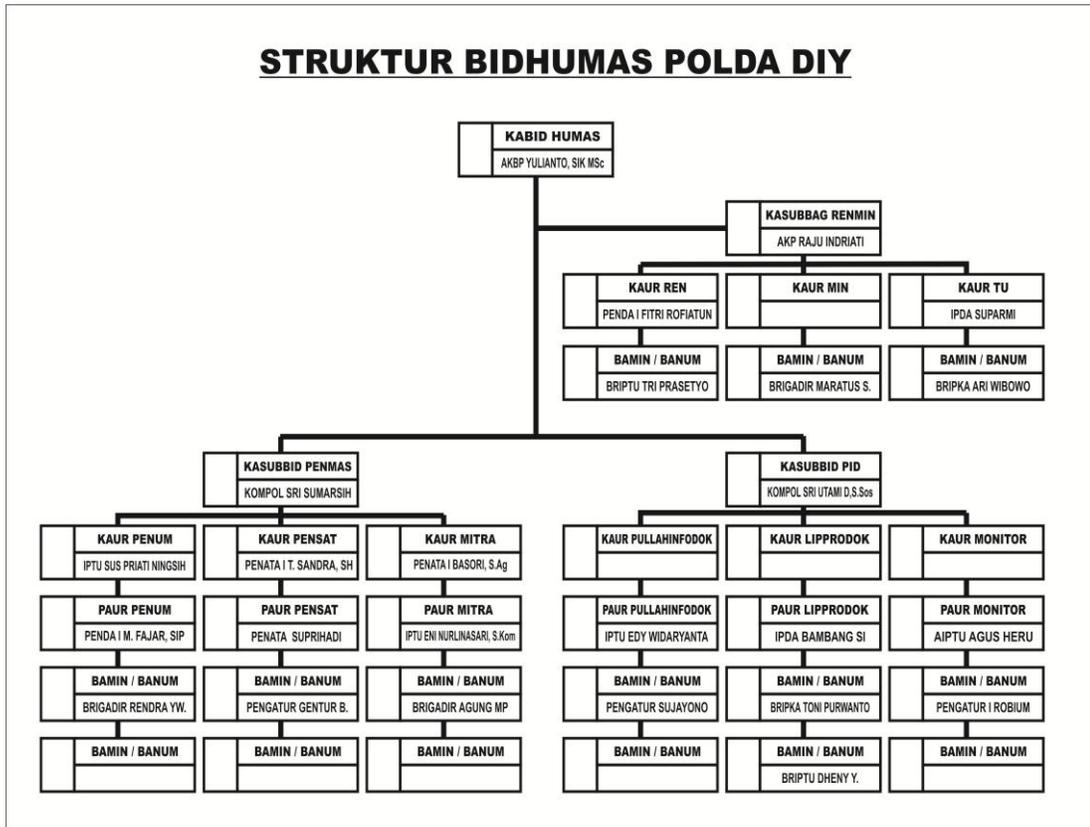
(Sumber : Website <http://jogja.polri.go.id/>, Diakses 28 Maret 2017)

Bidang Humas sebagai salah satu bagian dari Polda DIY berdasarkan Peraturan Kapolri RI Nomor : 22 /2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi Polri ditingkat kepolisian daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerangan umum dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan opini publik yang positif terhadap citra Polri

melalui kegiatan jumpa pers, Press release, keterangan Pers, Talk show dan dialog interaktif serta Counter berita;

- b. Melaksanakan kegiatan penerangan kesatuan organisasi khususnya penerangan kesatuan jajaran Polda DIY dengan penerbitan majalah Manggala Naya Wiwarottama (MNW) sebagai media untuk menyampaikan informasi dan memberikan penerangan pada anggota Polri/PNS dan keluarganya;
- c. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) kemudian kepada KPID, PWI dan AJI.
- d. Melaksanakan dokumentasi semua kegiatan lingkungan Polda DIY, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi dan memproduksi bahan-bahan/materi-materi yang berhubungan dengan tugas-tugas operasional dan pembinaan maupun fungsi.
- e. Memonitor situasi dan kondisi kamtibmas/kejadian di wilayah hukum Polda DIY melalui kliping dari SKH (media cetak) dan media elektronik.



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Bid Humas Polda DIY
(Sumber : *Arsip Bid Humas Polda DIY, 21 April 2017*)

Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas, Bidang Humas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan fungsi Humas dalam lingkungan Polda
- b. Penyelenggaraan penerangan umum yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerjasama/ kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka membentuk opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

- c. Penyelenggaraan penerangan satuan dalam rangka pemerataan informasi dilingkungan Polri.
- d. Penyelenggaraan liputan, monitoring, produksi dan dokumentasi semua informasi yang berkaitan dengan tugas Polri

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Tahun 2017 Bidang Humas Polda DIY
(Sumber: Arsip Bid Humas Polda DIY, 21 April 2017)

Rencana Kegiatan Tahun 2017 BIDANG HUMAS POLDA DIY	
Waktu	Kegiatan
Januari – Desember (Harian)	<ul style="list-style-type: none"> - (Harian) Kliping Media cetak - Monitoring Media - Pengelolaan media sosial - Liputan kegiatan internal & eksternal - Kelola <i>Command Center</i> & Polisi Kita
Januari – Desember (Bulanan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pencetakkan Majalah Internal Tribrata News Jogja - Rapat & Evaluasi Internal Bid Humas - Press Release Kegiatan Polda DIY
Januari (Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Penerangan Satuan, berisi informasi kebijakan dari Kapolda kepada jajaran mulai Polda, Polres, sampai Polsek.
Januari, Maret, Juni, September, Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Fungsi Kehumasan untuk meningkatkan kemampuan anggota Bid Humas dalam bidang <i>Public Relations</i> (jurnalistik, dokumentasi, <i>public</i>

(khusus)	<i>speaking, public relations</i>)
Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, Desember	- Talkshow di media televisi lokal Yogyakarta (ADI TV, Jogja TV, dan RBTV) Februari : Sosialisasi Operasi Simpatik Maret : Penerimaan anggota baru Polri Yogyakarta April : Kambtinas Mei : Sosialisasi pengamanan jelang ramadan dan lebaran Juli : Hari Bhayangkara September : Hari Polwan, dan pengamanan lalu lintas Desember : Pengamanan jelang Natal dan tahun baru
Maret-Mei	Kemitraan dengan media (silaturahmi Kapolda DIY kepada Pemimpin Redaksi media massa)
Maret	Rapat Kerja Teknis Fungsi Kehumasan (Rakernis) di Jakarta
April	Penyampaian hasil Rakernis di Yogyakarta
Desember	Jumpa pers evaluasi kegiatan untuk tahun 2017 yang dinamakan “Jumpa Pers Akhir Tahun 2017 Kapolda DIY”

C. Program Aplikasi Polisi Kita

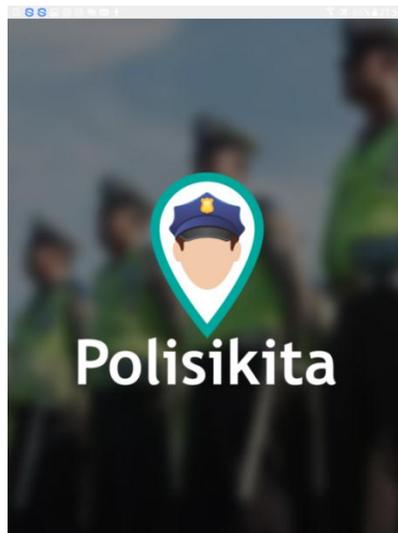
Teknologi maju dan berkembang sangat pesat. Masyarakat kini telah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari khususnya *smartphone* atau gadget. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan gadget saat ini dimasyarakat tidak hanya sebatas berkomunikasi jarak jauh satu sama lain, namun juga untuk menunjang kebutuhan informasi, bersosial media, berbelanja, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Oleh karenanya, Polda DIY mengusung sebuah konsep pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi menggunakan produk aplikasi yang dapat digunakan melalui gadget atau *smartphone* yang terkoneksi internet guna meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat khususnya Yogyakarta dengan mengusung topik pemikiran “*Jogja Smart Police and Smart City*”

Konsep pelayanan masyarakat berbasis teknologi ini dilatarbelakangi berdasarkan program yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian sejak dilantik pada 13 Juli 2016 lalu yakni Promoter. Promoter singkatan dari Profesional, Modern, dan Terpercaya memiliki 10 program prioritas dan 1 *Quick Wins* yang ditujukan untuk seluruh organisasi Kepolisian di seluruh Indonesia dengan harapan program tersebut dapat implementasikan guna meningkatkan kinerja Polri dan memenuhi Nawacita program Presiden Republik Indonesia dimana Negara dapat hadir dan membantu masyarakat.

Salah satu program prioritas Kapolri yang bertujuan untuk peningkatan kualitas Polri dalam bidang pengembangan teknologi ialah pada promoter nomor 2, yakni “peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis Teknologi Informasi (TI)”. Kepolisian di seluruh Indonesia berlomba-lomba dalam mewujudkan promoter Kapolri dengan mengembangkan pelayanan masyarakat menggunakan teknologi, salah satunya adalah Polda DIY. Kapolda DIY tahun 2016 Brigjen Pol Drs. Prasta Wahyu Hidayat SH, MM, MHum merealisasikan program Kapolri tersebut dengan mengembangkan sebuah produk layanan berbasis TI bernama *Command Center* atau Pusat Komando. *Command Center* memiliki beberapa multi produk pelayanan masyarakat diantaranya: *Call Center* dan *SMS Center*, *CCTV Ruang Publik*, *Community Policing Netizen*, *Intelligence Media Management (IMM)*, *SKCK Online*, dan aplikasi Polisi Kita.

Polisi Kita merupakan salah satu produk unggulan yang diciptakan Polda DIY, dimana aplikasi tersebut merupakan sarana penyampaian aduan dan laporan dari masyarakat seperti adanya kriminalitas, kecelakaan kendaraan, masalah lalulintas, gangguan-gangguan dimasyarakat, serta informasi sosial kemasyarakatan. Aplikasi tersebut berbasis Android yang dapat diunduh melalui *Google Playstore* dengan sistem pemetaan laporan secara digital atau melalui GPS, yakni laporan dari pelapor tersebut masuk kedalam posko promoter yang dikontrol dan diawasi selama 24 jam oleh staf Bidang TI dan Humas Polda DIY. Selanjutnya laporan tersebut dipetakan secara digital dan informasi tersebut langsung didistribusikan kepada Polres atau

Polsek terdekat dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) (Sumber: Materi Jumpa Pers Akhir Tahun 2016 Kapolda DIY). Polisi Kita memiliki jangkauan laporan secara *Real-Time* yakni wilayah DIY saja, namun untuk layanan lain seperti notifikasi pemberitaan laporan dan informasi layanan lainnya tetap dapat diakses meskipun *user* atau pengguna aplikasi sedang berada di luar DIY (Udi Artya Setyawan – Konsultan Ahli Humas Polda DIY, Hasil Wawancara, 23 Maret 2017).

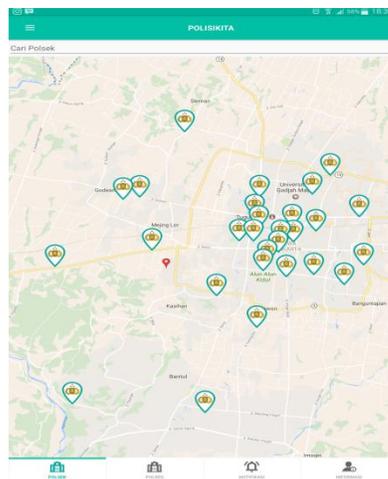


Gambar 2.5. Icon Polisi Kita
(Sumber : Aplikasi PolisiKita)

Polisi Kita diluncurkan pada tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Serbaguna Polda DIY. Aplikasi tersebut sukses menjadi pelayanan masyarakat berbasis Android pertama yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah di Indonesia. Wakapolda DIY Kombes Pol Drs. Abdul Hasyim Gani, M.Si, mewakili Kapolda DIY secara resmi meluncurkan aplikasi Polisi Kita, dengan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah, pejabat utama Polda DIY, Polres, Polsek, rekan-rekan

media cetak, televisi lokal, dan nasional. Kepala Bidang TI Polda DIY AKBP Ir. M. Sjamsul Arief, M.T juga secara langsung mendemonstrasikan cara kerja aplikasi Polisi Kita dihadapan para tamu undangan dan juga memutarakan video mengenai simulasi penggunaan aplikasi. (Sumber: Majalah Tribrata News Jogja edisi Agustus 2016).

Polisi Kita memiliki beberapa fasilitas layanan yang terintegrasi dengan internet yakni :

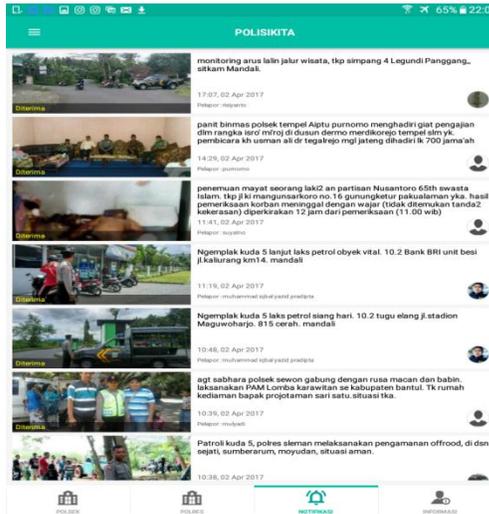


Gambar 2.6. Lokasi Polsek dan Polres Terdekat Melalui Sistem GPS

(Sumber : Aplikasi PolisiKita)

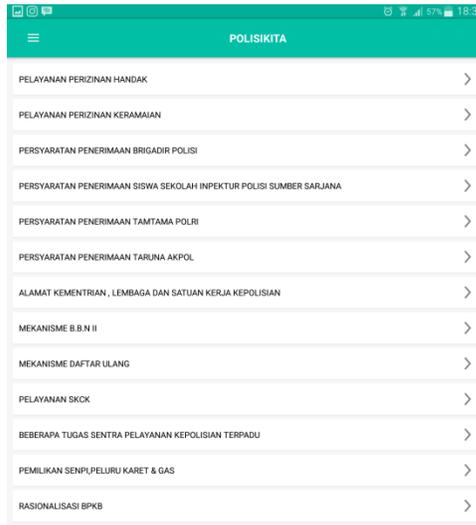
1. Layanan pengaduan dan pelaporan masyarakat. Polisi Kita yang sudah terunduh dan terkoneksi dengan internet dan GPS aktif akan secara otomatis melacak keberadaan pengguna, hal ini bertujuan ketika pengguna melaporkan kejadian darurat dan membutuhkan penanganan Kepolisian, Polsek dan Polres terdekat dari tempat kejadian yang telah dilaporkan pengguna melalui foto atau VOIP

(Voice Over Internet Protocol) dapat segera mendatangi lokasi untuk menindak kejadian.



Gambar 2.7. Menu Notifikasi Laporan Pengguna
(Sumber : Aplikasi PolisiKita)

2. Notifikasi Polisi Kita. Notifikasi berisi tentang informasi-informasi yang telah dikirimkan pelapor dapat diketahui oleh pengguna Polisi Kita lainnya, hal ini bertujuan agar pengguna dapat saling mengetahui peristiwa yang terjadi satu sama lain.



Gambar 2.8. Menu Informasi Layanan Masyarakat
(Sumber : Aplikasi PolisiKita)

3. Informasi Layanan Masyarakat. Menu Informasi pada Polisi Kita berisi beberapa informasi terkait layanan masyarakat bidang Kepolisian, contohnya seperti informasi Persyaratan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, Penerimaan Brigadir Polisi, Pelayanan SKCK secara online, dan lain sebagainya. Informasi tersebut dapat diakses di daerah manapun tidak harus di dalam wilayah DIY, asalkan masih terkoneksi dengan internet.

Aplikasi Polisi Kita terbagi menjadi dua, yakni Internal dan Eksternal. Polisi Kita Internal ditujukan untuk seluruh anggota Kepolisian DIY termasuk pejabat utama Polda DIY. Polisi Kita Internal bertujuan untuk melaporkan secara langsung aktivitas dan kegiatan yang dilakukan anggota di lapangan untuk diketahui pimpinan dan juga anggota Kepolisian internal yang lain. Saat ini jumlah pengunduh untuk Polisi Kita Internal sebanyak 1.000+ anggota. Kemudian untuk Polisi Kita Eksternal

ditujukan untuk masyarakat umum DIY agar dapat melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi dimasyarakat melalui aplikasi tersebut. Sampai saat ini, jumlah pengunduh Polisi Kita Eksternal berjumlah 10.000+ anggota, jumlah tersebut terhitung sejak aplikasi Polisi Kita resmi diluncurkan pada Agustus 2016 lalu (Udi Artya Setyawan – Konsultan Ahli Humas Polda DIY, Hasil Wawancara, 17 Februari 2017).

Peluncuran aplikasi Polisi Kita tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat bersikap cepat dan tanggap untuk dapat melaporkan kejadian-kejadian darurat kepada Kepolisian untuk segera ditindak dan juga memperkuat hubungan positif antara masyarakat dengan Polisi dan menumbuhkan citra positif yang lebih kuat untuk Polri. Polisi Kita juga bertujuan agar seluruh elemen Kepolisian DIY ketika bertugas di lapangan dapat menyesuaikan dengan modernisasi yang tumbuh di lingkungan dan peradaban masyarakat sehingga mampu menjaga eksistensi dalam rangka memberikan pelayanan prima dan hadirnya Kepolisian di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya, dari hasil pengamatan peneliti, sebagian besar laporan yang masuk pada menu notifikasi Polisi Kita adalah dari Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, dan kegiatan-kegiatan dilapangan lainnya, hanya sebagian kecil laporan dari masyarakat umum seperti laporan adanya informasi razia di daerah tersebut.

Kurangnya Informasi mengenai adanya aplikasi pelaporan yakni Polisi Kita menjadi salah satu penyebab kurangnya keterlibatan masyarakat umum dalam

melaporkan kejadian-kejadian melalui sarana teknologi aplikasi, masyarakat cenderung lebih memilih melaporkan kejadian tersebut melalui grup *Facebook* Info Cegatan Jogja yang merupakan salah satu grup *Facebook* binaan Polda DIY. Oleh karenanya, peran Humas sebagai jembatan antara organisasi dengan publik sangat penting untuk mengkomunikasikan Polisi Kita agar benar-benar sampai pada masyarakat.

Staf Humas Polres Bantul yakni Bripka Maryono mengatakan bahwa aplikasi Polisi Kita dari segi sistem pelaporan sudah sangat baik dan mudah, hanya saja mengalami kekurangan pada jaringan internet tiap *smartphone* yang dimiliki pengguna berbeda-beda. Beliau mengatakan ketika jaringan internet pada *smartphone* buruk saat proses melaporkan kejadian di daerah yang jauh dari jangkauan jaringan internet, maka laporan tidak dapat terkirim (Bripka Maryono - Staf Bidang Humas Polres Bantul, Hasil Wawancara 12 Maret 2017).